

Chain Reaction Research merupakan koalisi yang terdiri dari Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

www.chainreactionresearch.com
info@chainreactionresearch.com

Penulis:

Sarah Drost, Aidenvironment
Barbara Kuepper, Profundo
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:
Shin Young Chung, APIL
Jinsuh Cho, APIL
Chris Wiggs, Aidenvironment
Okita Miraningrum, Aidenvironment



Perusahaan-Perusahaan Korea Selatan telah Memperbesar Dampaknya pada Pasar “Leakage” Minyak Sawit

Desember 2020

Laporan ini membahas peran perusahaan-perusahaan Korea Selatan di pasar minyak kelapa sawit global serta posisi negara tersebut sebagai pemilik konsesi perkebunan kelapa sawit, pembeli produk minyak sawit, dan pemodal kegiatan di sektor perkelapasawitan. Analisis ini menggarisbawahi peran negara tersebut dalam pasar “leakage”, yaitu pasar perdagangan minyak sawit yang tidak berkelanjutan dan berasal dari perusahaan perkebunan dan produsen yang tidak mematuhi kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).

Temuan Utama:

- **Perusahaan Korea Selatan berperan besar di pasar “leakage”, baik sebagai pengembang perkebunan maupun pembeli produk minyak sawit.** Meskipun industri perkelapasawitan global semakin tercakup oleh komitmen NDPE, perusahaan perkebunan yang terkait deforestasi tetap menyalurkan minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan ke pasar internasional.
- **Enam perusahaan pemilik perkebunan asal Korea Selatan terlibat isu yang terkait dengan lingkungan, sosial dan hak asasi manusia:** Keenam perusahaan tersebut adalah Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation dan JC Chemical.
- **Di antara keenam perusahaan tersebut, Korindo dan Posco menjadi perusahaan dengan total deforestasi tertinggi.** Pada tahun 2016 dan 2017, lebih dari 17.500 ha hutan dibuka di areal konsesi milik kedua perusahaan tersebut. Selain itu, Daesang Corporation juga sudah membuka 347 ha lahan gambut di areal konsesinya setelah tahun 2016.
- **Perusahaan perkebunan Korea Selatan masih mendapatkan pembeli meskipun dibekukan oleh perusahaan dagang besar.** Korindo dan Posco menyalurkan minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan kepada perusahaan penyulingan non-NDPE di India, terutama Emami Agrotech dan 3F Industries. LG Corporation juga melayani pasar non-NDPE di India.
- **Pembeli terbesar produk minyak sawit Indonesia di Korea Selatan, yakni JC Chemical, Dansuk Industrial, GS Global, AK Holdings, LG Corporation dan SK Eco Prime, tidak mempunyai komitmen NDPE.** Perusahaan yang memasok pada pembeli non-NDPE antara lain adalah Incasi Raya, Tunas Baru Lampung, Best Industry Group, Salim Group dan Wings Group.
- **Lembaga keuangan di Korea Selatan dan Eropa mendanai perusahaan perkebunan “leakage” asal Korea Selatan di luar negeri meskipun**

dikaitkan dengan isu deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. National Pension Service, Samsung Life Insurance dan beberapa investor lain asal Korea Selatan tidak mempunyai kebijakan mengenai deforestasi. Di antara perbankan Eropa, BNP Paribas, Standard Chartered dan HSBC menyediakan jasa keuangan dan juga mempunyai kebijakan nol deforestasi. BlackRock dan Vanguard merupakan pemegang saham besar di perusahaan pengembang perkebunan.

Pasar “Leakage” minyak sawit terkait Korea Selatan tetap terjadi walaupun adanya transformasi positif di industri perkelapasawitan

Meskipun industri perkelapasawitan global semakin tercakup oleh komitmen Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE), perusahaan perkebunan yang tidak patuh tetap menyalurkan minyak sawit yang tidak berkelanjutan ke pasar internasional. Perusahaan Korea Selatan berperan besar dalam pasar “leakage” global tersebut. Kelompok pemain “leakage” termasuk perusahaan perkebunan milik Korea Selatan seperti Korindo Group, Posco International dan Daesang Corporation. Di Indonesia, hutan dan lahan gambut di areal konsesi perkebunan milik ketiga perusahaan tersebut dibuka setelah tanggal 1 Januari 2016. Tanggal tersebut umumnya dianggap sebagai tanggal batas akhir untuk kepatuhan NDPE.

Meskipun kebijakan NDPE untuk kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia per bulan April 2020 mencapai **83 persen**, cakupan NDPE untuk pasar wilayah lain belum setinggi itu. Kemungkinan besar, India, Tiongkok, Pakistan dan Bangladesh merupakan **pasar “leakage” yang terbesar**. Perusahaan perkebunan asal Korea Selatan seperti Korindo, Posco dan LG Corporation **memasok** minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) kepada perusahaan penyulingan non-NDPE di India, seperti Emami Agrotech.

Perusahaan perkebunan non-NDPE asal Korea Selatan dikaitkan dengan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia

Enam perusahaan asal Korea Selatan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia: **Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation dan JC Chemical**. Perusahaan-perusahaan tersebut secara total mengoperasikan konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 235.512 hektar (ha) di Indonesia (lihat Gambar 1), setara dengan satu persen dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seluas **22,3 juta** ha. Walau porsi ini terasa relatif kecil, dampak sosial dan lingkungan dari konsesi perkebunan tersebut cukup signifikan. Hasil produksi minyak sawit mentah (CPO) tahunan yang dilaporkan – untuk bahan bakar dan pengolahan – mencapai 410.000 ton (lihat Gambar 1). Angka ini belum termasuk hasil produksi dari konsesi perkebunan Korindo, karena perusahaan tersebut tidak transparan mengenai tingkat produksi minyak sawitnya. Dengan estimasi hasil produksi minyak sawit sebesar **4-5 ton per ha** dan estimasi areal tanam seluas 79.808 ha (luas areal konsesi dikurangi lahan terdampar seluas 53.318 ha), minyak kelapa sawit dari Korindo setidaknya menambah kontribusi sebesar 300.000 ton lagi. Berdasarkan data ini, total produksi tahunan minyak sawit “leakage” (minyak sawit yang tidak berkelanjutan) oleh perusahaan perkebunan Korea Selatan di Indonesia mencapai 710.000 ton.

Sampai saat ini, belum satupun dari perusahaan perkebunan Korea Selatan ini yang menerapkan kebijakan NDPE. Meskipun Posco International **mengumumkan** posisinya sebagai “perusahaan pertama dari Korea yang membuat komitmen NDPE” pada bulan Maret 2020, informasi mengenai rencana maupun tindakan pelaksanaannya belum ada. Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit milik Samsung Construction &

Trading (C&T) Corporation Trading dan Investment Group di Indonesia [mendapat sertifikat](#) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada bulan Mei 2019 dan [dilaporkan sebagai](#) “perusahaan Korea Selatan pertama yang mengoperasikan perkebunan sawit di Indonesia yang mendapatkan sertifikat RSPO”. Namun, sampai saat ini, perusahaan tersebut belum mengumumkan daftar pemasoknya, dan belum menunjukkan kepatuhan pada kebijakan NDPE.

Pada tahun 2019, dua LSM asal Korea, yaitu Korea Federation for Environmental Movements (KFEM) dan Advocates for Public Interest Law (APIL), [mengaitkan](#) keenam perusahaan perkebunan asal Korea Selatan tersebut dengan berbagai persoalan lingkungan, sosial dan hak asasi manusia di Indonesia.

Gambar 1: Perusahaan Korea Selatan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

Perusahaan	Anak perusahaan	Luas areal konsesi (ha)/Lokasi	Kebijakan NDPE?	Produksi tahunan CPO yang dilaporkan (ton)
Korindo Group	PT Papua Agro Lestari PT Gelora Mandiri Membangun PT Dongin Prabhawa PT Berkat Cipta Abadi 1 dan 2 PT Tunas Sawaerma 1A, 1B, dan 2	133.126 / Papua dan Maluku Utara	Tidak ada	Informasi tidak tersedia untuk umum Estimasi > 300.000
Posco International	PT Bio. Inti Agrindo	34.184 / Merauke, Papua	<u>Ada</u> (namun belum diterapkan)	<u>80.000</u>
LG Corporation	PT Parna Agromas PT Tintin Boyok Sawit Makmur PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua PT Grand Utama Mandiri	31.513 / Sekadau, Kalimantan Barat	Tidak ada	<u>150.000</u>
Samsung C&T	PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda Plantation	21.703 (RSPO: <u>23.830 ha</u>) / Pelalawan & Indragiri Hulu, Riau	Tidak ada	<u>100.000</u>
Daesang Corporation / Miwon Indonesia	PT Sintang Raya dan PT Miwon Agro Kencana Sakti (izin tidak ada)	11.212 / Kubu Raya, Kalimantan Barat	Tidak ada	<u>35.000</u>
JC Chemical	PT Niagamas Gemilang	3.774 (JC Chemical: <u>7.200 ha</u>) / Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Tidak ada	<u>45.000</u>
Total		235.512 ha		710.000

Sumber: Disusun oleh Aidenvironment, berdasarkan data konsesi (msl. HGU, peta kadastral) dan situs web perusahaan

Korindo dan Posco terkait dengan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia

Perusahaan Korea Korindo Group dan Posco International membuka hutan seluas 16.674 ha di Provinsi Papua pada tahun 2016 dan 2017. Di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi di Provinsi Papua, total luas deforestasi yang dilakukan oleh anak perusahaan Korindo, yaitu PT Papua Agro Lestari (PT PAL), PT Tunas Sawaerma 1B dan PT Dongin Prabhawa di areal konsesinya mencapai 3.714 ha pada tahun 2016, dan 562 ha pada tahun 2017 (lihat Gambar 2). Selain itu, Korindo juga membuka 930 ha hutan di areal konsesinya seluas 8.432 ha di Provinsi Maluku Utara selama periode yang sama. Perusahaan tersebut menggunakan [pembakaran ilegal](#) untuk membuka lahan. Meskipun Korindo berkomitmen pada [moratorium](#) atas pembangunan baru di perkebunannya yang diberlakukan sejak tahun 2017, Korindo belum menerapkan kebijakan NDPE pada tingkat grup, belum menyelesaikan konflik dan skema ganti rugi untuk [masyarakat setempat](#) di Indonesia, dan juga belum berkomitmen untuk melakukan kompensasi atau pemulihan atas areal yang mengalami deforestasi.

Bersebelahan dengan konsesi PT PAL milik Korindo, anak perusahaan Posco International, yaitu PT Bio. Inti Agrindo (PT BIA) membuka 36 persen (12.398 ha) dari areal konsesinya seluas 34.184 ha pada tahun 2016 dan 2017 (lihat Gambar 2). Dari tahun 2012 sampai 2017, PT BIA bertanggungjawab atas perusakan hutan seluas [26.500 ha](#). Dari total ini, perusahaan tersebut membuka 12.398 ha setelah tanggal batas akhir kepatuhan NDPE pada tahun 2016, dan menggunakan [pembakaran](#) ilegal untuk membuka lahan.

Gambar 2: Deforestasi di Indonesia oleh Korindo dan Posco setelah tahun 2016

Perusahaan	Anak perusahaan	Lokasi (kabupaten, provinsi, wilayah)	Luas areal konsesi (ha)	Deforestasi (ha)		Total luas deforestasi (ha) 2016 dan 2017
				2016	2017	
Korindo Group	PT Papua Agro Lestari	Merauke, Papua, Papua	25.203	1.854	562	2.416
	PT Tunas Sawaerma 1B	Boven Digoel, Papua, Papua	11.351	1.192	0	1.192
	PT Gelora Mandiri Membangun	Halmahera Selatan, Maluku Utara, Maluku	8.432	911	19	930
	PT Dongin Prabhawa	Mappi, Papua, Papua	33.537	668	0	668
Posco Int.	PT Bio. Inti Agrindo	Merauke, Papua, Papua	34.184	7.134	5.264	12.398
Total				11.759	5.845	17.604

Sumber: Disusun oleh Aidenvironment, berdasarkan data konsesi (msl. HGU, peta kadastral) dan data deforestasi (Satelit Sentinel 1 dan 2)

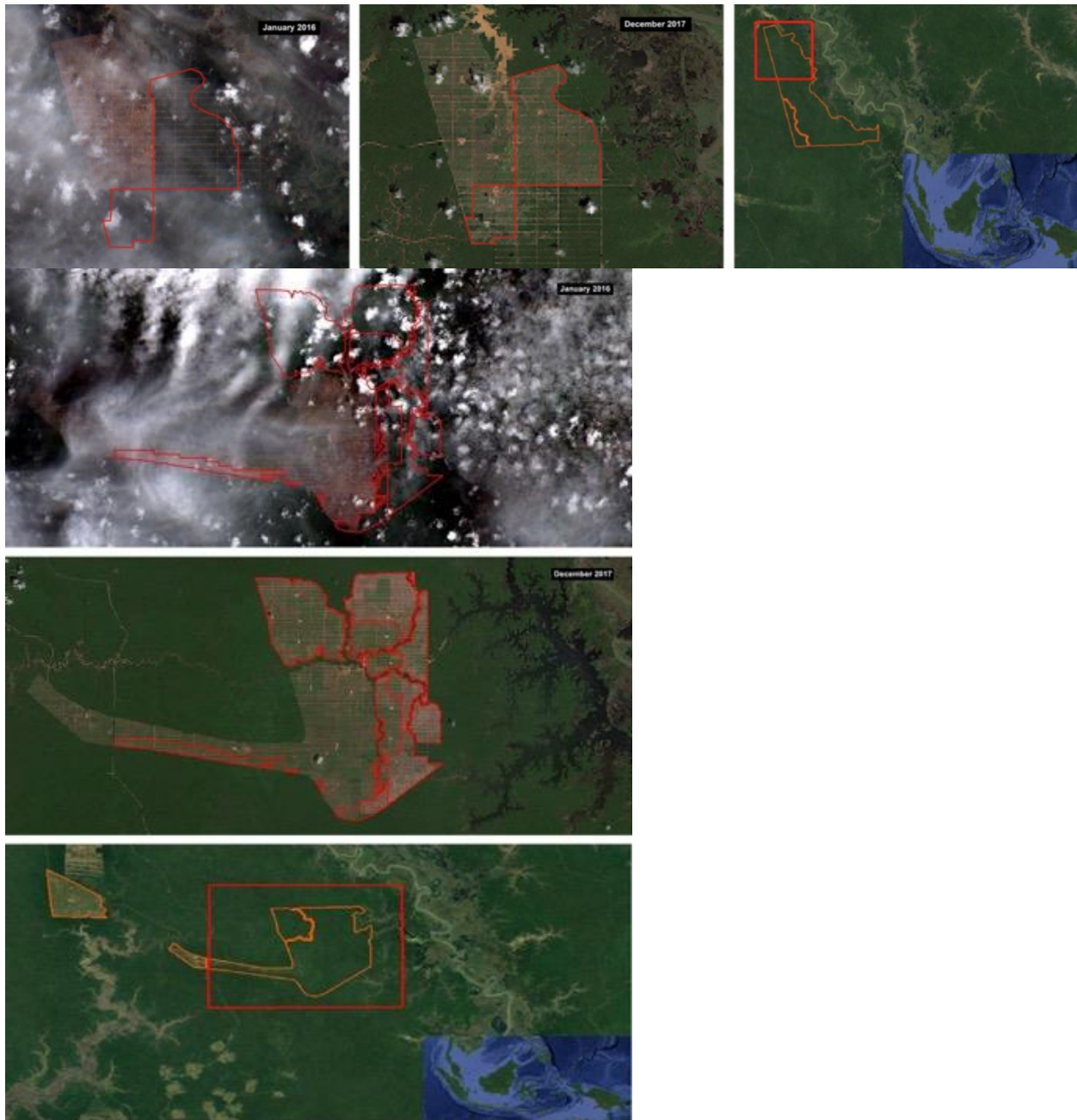
Korindo dan Posco dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Pada tahun 2017, Panel Pengaduan Forest Stewardship Council (FSC) [menyimpulkan](#) bahwa Korindo Group telah melanggar standar FSC dengan melakukan perusakan NKT melalui deforestasi dan pembakaran di areal konsesi PT PAL dan PT Gelora Mandiri Membangun (GMM). Selain itu, perusahaan tersebut juga melanggar hak asasi manusia dengan [menahan informasi](#) yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang berguna untuk mengambil keputusan yang terinformasi. Namun demikian, pada bulan November 2019, FSC memutuskan untuk [tidak memberlakukan](#) sanksi dan memberikan waktu selama lima tahun lagi kepada Korindo untuk mencapai mematuhi aturan FSC.

Pada tahun 2020, Korindo terlibat dengan masalah sosial berat akibat kegiatannya di Indonesia. Pada bulan Mei 2020, [dilaporkan bahwa](#) seorang masyarakat adat dianiaya oleh anggota kepolisian di kantor PT Tunas Sawa Erma, sebuah anak perusahaan Korindo, hingga meninggal dunia. [Berdasarkan informasi](#), korban ingin “melakukan klarifikasi terhadap penggusuran kebun pisang miliknya”. Selain itu, pada bulan Juni 2020, Mongabay, Newstapa (Pusat Jurnalisme Investigatif Korea) dan Al Jazeera [menemukan kaitan](#) perusahaan tersebut dengan pembayaran “konsultansi” yang mencurigakan sebesar \$AS 22 juta untuk pembelian lahan berskala besar oleh PT PAL, yaitu anak perusahaan Korindo di Provinsi Papua di Indonesia. Pembayaran tersebut kemungkinan tersembunyi oleh [struktur kepemilikan](#) Korindo yang tidak transparan, kepemilikan saham yang rumit, dan 62 perusahaan tempurung di berbagai yurisdiksi dengan transparansi yang rendah. Walaupun Korindo mengklaim sebagai [100 persen](#) perusahaan Indonesia, pada tahun 2018 pengadilan di Korea Selatan menjatuhkan hukuman pada pendiri Korindo, yaitu keluarga Seung untuk membayar sekitar \$AS 90 juta atas penghindaran pajak. [Penelitian](#) investigatif menyingkap “*kepemilikan saham rumit menjadi ciri utama pada perusahaan raksasa milik keluarga yang mendominasi perekonomian Korea Selatan.*”

Anak perusahaan Posco International, yaitu PT BIA, dituding [menyebabkan](#) konflik lahan antar masyarakat adat dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya. PT BIA [diduga](#) membayar uang kompensasi kepada masyarakat adat suku Marind, padahal pemegang hak ulayat atas lahan tersebut

adalah masyarakat adat suku Mandobo, sehingga mengakibatkan konflik antar masyarakat adat. Masyarakat di dalam areal perkebunan juga [menuding](#) PT BIA mencemari Sungai Bian akibat kegiatan operasionalnya. Sebagai kompensasi atas deforestasi yang pernah dilakukan, Posco International [berjanji](#) untuk “melaksanakan program di luar areal konsesinya pada skala yang sesuai dengan luas areal perkebunan yang telah dikembangkan”. Pada bulan Februari 2020, [menurut laporan](#) Posco membayar kompensasi sebesar Rp 200 juta (\$AS 14.132) kepada masyarakat adat suku Marind atas perusakan hutan sakral akibat kegiatan pengembangan perkebunan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah daripada Rp 3 miliar (\$AS 212.300) yang diminta dan diharapkan oleh masyarakat.

Gambar 3: Deforestasi di areal perkebunan Korindo dan Posco dari tahun 2016-2017



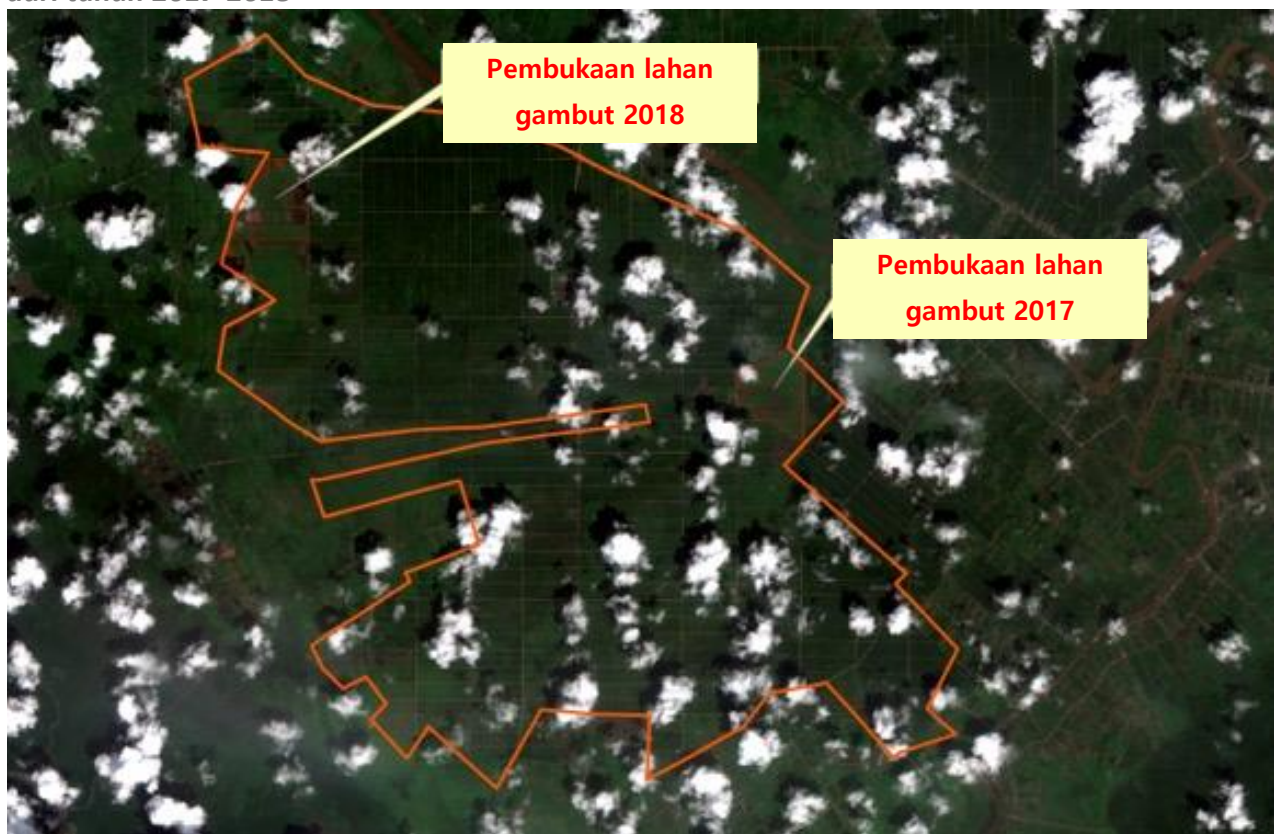
Sumber: Aidenvironment-Earth Equalizer, berdasarkan data deforestasi (Satelit Sentinel 1 dan 2) dan data kadaster. Gambar atas: anak perusahaan Korindo, PT PAL. Gambar bawah: anak perusahaan Posco International, PT BIA.

Posco International dan Korindo Group terlihat mempunyai hubungan yang erat. Korindo menjadi penasihat Posco untuk perkebunan PT BIA yang terletak bersebelahan dengan perkebunan PT PAL milik Korindo. Selain itu, kedua anak perusahaan perkebunan tersebut [tergabung](#) di bawah nama seorang pengusaha Korea, Kim Nam Ku, masing-masing pada tahun 2007 dan 2006.

Anak perusahaan perkebunan Deasang, Samsung, LG dan JC Chemical dikaitkan dengan isu lingkungan, sosial dan hak asasi manusia

Seperti halnya Korindo dan Posco, perusahaan perkebunan asal Korea, yaitu Daesang Corporation, Samsung C&T, LG Corporation dan JC Chemical dikaitkan dengan isu sosial, budaya dan hak asasi manusia di Indonesia. Daesang Corporation terlibat dalam pembukaan lahan gambut seluas 347 ha di areal konsesinya setelah tahun 2016 (lihat Gambar 4). Daesang Corporation memproduksi berbagai macam bumbu dengan merek dagang Miwon dan bahan makanan dengan merek dagang Cheongjunwon. Anak perusahaan perkebunannya, yaitu PT Sintang Raya membuka 148 ha lahan gambut pada tahun 2017 dan 199 ha lahan gambut pada tahun 2018. Selain itu, masyarakat di Desa Seruat Dua, Kabupaten Pontianak [mengklaim](#) bahwa PT Sintang Raya menggarap lahan tanpa persetujuan dari masyarakat, dan bahwa perusahaan tidak [merealisasi](#) janjinya untuk menyediakan lahan plasma kepada masyarakat setempat. Terdapat pula [laporan](#) mengenai masalah hak pekerja dan risiko akan perdagangan anak di areal perkebunan tersebut.

Gambar 4: Pembukaan lahan gambut oleh Daesang Corporation di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017-2018





Sumber: Aidenvironment-Earth Equalizer, anak perusahaan Daesang Corporation PT Sintang Raya

Seperti halnya dengan Korindo dan Posco, anak perusahaan perkebunan Samsung C&T, yaitu PT Gandaerah Hendana dan PT Inecda di Provinsi Riau, pulau Sumatra dikaitkan dengan masalah sengketa lahan, pencemaran air, kompensasi dan ketenagakerjaan. Grup Dagang dan Investasi Samsung C&T mengakuisisi dua perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008, dengan tujuan memperoleh pasokan bahan baku minyak sawit tetap untuk usaha biosolarnya. PT S&G Biofuel Pte. Ltd, sebuah usaha patungan Samsung C&T dan perusahaan Indonesia Athena City Holdings, menanam investasi sebesar \$AS 55 juta untuk mengakuisisi dan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit tersebut. Pada tahun 2016, masyarakat lokal menyatakan bahwa 42 ha lahan yang diklaim oleh perusahaan merupakan hak milik mereka. Masyarakat di sekitar areal perkebunan diduga menderita akibat rusaknya situs upacara adat, pencemaran dan kelangkaan air, sedangkan pekerja perkebunan mengeluhkan jam kerja yang berlebihan, penggunaan bahan berbahaya dan beracun tanpa alat pelindung diri, dan kondisi kehidupan yang tidak memadai. Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat menimbulkan aksi unjuk rasa dan mogok kerja oleh warga dan pekerja sampai tahun 2020.

LG Corporation terlibat masalah sengketa lahan dan pencemaran lingkungan di tiga pabrik dan empat perkebunan kelapa sawitnya. Pada tahun 2010, warga Desa Semadu di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa 318 ha areal lindung mereka dimasukkan dalam areal perkebunan anak perusahaan LG, yaitu PT Parna Agromas. Masalah ini masih belum diselesaikan sampai sekarang. Masyarakat sekitar PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua juga menyuarakan isu tumpang tindih lahan antara areal konsesi perkebunan perusahaan dan lahan milik masyarakat. Selain itu, PT Tintin Boyok Sawit Makmur juga dituding mengakibatkan pencemaran sungai pada tahun 2015. Pada tahun 2019, PT Grand Utama Mandiri diduga membuka lahan dengan cara membakar.

JC Chemical, produsen biosolar asal Korea, diduga terlibat masalah pembuangan limbah melalui anak perusahaan PT Niagamas Gemilang. Anak perusahaan JC Chemical, PT Niagamas Gemilang mempunyai

perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Barat yang [memproduksi](#) minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (MIKS). Aidenvironment/Earth Equalizer memperkirakan areal konsesi perkebunan yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 3.744 ha, namun JC Chemical merujuk pada areal tanaman kelapa sawit seluas [7.200 ha](#). Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara [menuding](#) PT Niagamas Gemilang membuang air limbah di Sungai Jembayan, sehingga mengakibatkan [pencemaran](#) sungai dan banyak ikan mati.

Perusahaan perkebunan asal Korea tetap menemukan pasar untuk minyak sawit “leakage” meskipun telah terjadi pembekuan

Korindo masih memproduksi dan menjual minyak sawit dan kayu non-NDPE meskipun terjadi pembekuan

Korindo Group telah [dibekukan](#) oleh banyak pedagang NDPE dari tahun 2016 sampai 2018 akibat deforestasi, pembakaran ilegal dan perusakan NKT di areal konsesinya. [Nestlé](#), [Bunge Loders Croklaan](#), [Wilmar](#) dan [Cargill](#), antara lain, telah berkomitmen untuk tidak melakukan pembelian dari Korindo. Sebelum tahun 2016, Korindo telah membuka [30,000 ha](#) hutan di tujuh areal konsesi di Indonesia, di mana 12.000 ha di antaranya merupakan hutan primer. Dari tahun 1998 sampai 2016, 50.000 ha lainnya dibuka dalam areal konsesi perkebunan milik perusahaan tersebut. Kalkulasi terbaru oleh Aidenvironment/Earth Equalizer memperlihatkan tegakan hutan yang masih utuh dan lahan gambut seluas 53.318 ha di dalam lokasi perkebunan perusahaan tersebut di Papua, Indonesia yang dapat dianggap sebagai [lahan terlantar](#) yang tidak dapat dikembangkan.

Menghadapi pembekuan tersebut, Korindo beralih memasuki [pasar bahan bakar nabati](#) regional pada tahun 2019. Perusahaan yang mengalami pembatasan akses pada pasar NDPE kemungkinan beralih ke [industri bahan bakar nabati](#) di Asia Tenggara yang selama ini kurang memberlakukan syarat keberlanjutan. Dalam sebuah usaha Bersama dengan perusahaan Korea Selatan GF Oil dan Sejong Technology, Korindo ikut dalam [rencana](#) pembangunan pabrik bahan bakar nabati di pulau Bintan di Indonesia. Menurut rencana, pabrik yang akan menggunakan bahan baku minyak sawit dari Korindo tersebut bertujuan untuk memproduksi sekitar [3 juta](#) ton bahan bakar nabati pada akhir fase ketiganya.

Korindo tetap menyalurkan minyak sawit kepada perusahaan penyulingan non-NDPE di India, terutama 3F Industries dan Emami Agrotech. Pada tahun 2019, Korindo mengeksport [46.480 ton](#) minyak sawit ke India, di mana 23.510 ton di antaranya diimpor oleh 3F Industries (51 persen), 18.483 ton oleh Emami Agrotech (40 persen) dan 4.487 ton (9 persen) oleh perusahaan lain (Golden Agri-Resources dan Mantora Oil Products). 3F Industries, sama seperti Emami Agrotech, merupakan salah satu dari [tujuh](#) perusahaan penyulingan non-NDPE terbesar yang menerima 34 persen dari keseluruhan impor CPO di India. Portofolio produk perusahaan multinasional asal India tersebut mencakup produsen lemak dan minyak, kosmetik, oleokimia dan farmasi. 3F Industries juga mempunyai pabrik pengolahan di Krishnapatnam, Hyderabad dan Tadepalligudem di India, dan Tema di Ghana.

[Emami Agrotech](#) merupakan bagian usaha produsen lemak dan biosolar dari [Emami Group](#), yaitu grup perusahaan asal India yang bergerak di bidang barang konsumen, pembuatan kertas koran dan kertas kardus, lemak dan biosolar, properti serta ritel. Perusahaan tersebut merupakan pengimpor lemak terbesar kedua di India dan salah satu perusahaan pengolahan/pedagang minyak sawit tanpa kebijakan NDPE yang terbesar di dunia. [Pabrik penyulingannya](#) di Haldia (negara bagian Benggala Barat) dan

Krishnapatnam (negara bagian Andhra Pradesh) mempunyai kapasitas penyulingan total sebesar [5.000 ton per hari](#).

Selain memproduksi minyak sawit non-NDPE, Korindo juga [dilaporkan](#) merupakan pemasok kayu untuk Olimpiade Musim Panas di Tokyo yang tertunda hingga tahun 2021. Pada Tahun 2018, sepertinya perusahaan tersebut menyediakan kayu lapis kepada perusahaan dagang kayu dan bahan bangunan Jepang, Sumitomo Forestry, yang memasokkan kayu tersebut ke Arena Ariake di Tokyo. [Mongabay](#) memperkirakan bahwa Korindo memproduksi kayu lapis senilai \$AS 319,9 juta dari kayu yang diambil di area perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dari tahun 2000 sampai 2017.

Posco International dan LG Corporation tetap melayani pasar non-NDPE di India

Posco International mengalami divestasi dan pembekuan karena terlibat dalam konversi hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit. Lembaga dana [Norwegian Sovereign Wealth Fund](#) dan [ABP](#) melakukan divestasi dari Posco (sebelumnya bernama Posco-Daewoo) masing-masing pada tahun 2015 dan 2018 akibat “perusakan lingkungan”. ABP [mengatakan](#) bahwa Lembaga dana tersebut sudah “kehilangan kepercayaan akan niat perusahaan untuk memperbaiki diri.” Setelah berbagai kampanye LSM, toko apotik terbesar di Inggris, yaitu [Boots](#) mengakhiri kemitraan ritelnya dengan Posco.

Sama seperti Korindo, minyak sawit Posco International juga diekspor kepada perusahaan penyulingan non-NDPE di India, Emami Agrotech dan 3F Industries. Secara keseluruhan, Posco mengekspor 56.397 ton CPO ke India pada tahun 2019, di mana [80 persennya](#) (45.261 ton) dikirim ke Emami Agrotech dan 20 persen sisanya untuk 3F Industries. Seluruh minyak sawit dengan tujuan Emami Agrotech dikirim langsung dari Pelabuhan Asike di Papua, sedangkan sisanya sebesar 11.136 ton dengan tujuan 3F Industries dikirim melalui Pelabuhan Dumai di pulau Sumatera.

LG Corporation juga memasok minyak sawit kepada perusahaan penyulingan non-NDPE di India. Berdasarkan data ekspor Indonesia, LG Corporation mengekspor 22.481 ton CPO, di mana 4.001 ton langsung dijual kepada Emami Agrotech dan 3.076 ton kepada 3F Industries. Selain India, LG Corporation juga memasok 5.001 ton CPO kepada Felda IFFCO di Malaysia. Samsung mengekspor CPO sebesar 3.010 ton kepada IOI di Malaysia.

Anak perusahaan perkebunan Daesang, yaitu PT Sintang Raya terdaftar sebagai pemasok perusahaan-perusahaan berikut: [AAK](#), [Bunge Loders Crocklaan](#), [Wilmar](#), [Sime Darby](#) dan [General Mills](#). Anak perusahaan JC Chemical, yaitu PT Niaga Mas Gemilang muncul sebagai pemasok untuk [Fuji Oil](#), [Cargill](#), [General Mills](#), [Louis Dreyfus Company](#), [Golden Agri Resources](#) dan [Lipidos Santiga](#).

Korea Selatan meningkatkan perannya dalam perdagangan dan konsumsi minyak sawit

Impor minyak sawit di Korea Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat selama satu dasawarsa terakhir. Pada tahun 2019, 648.496 ton minyak sawit dan produk minyak sawit dideklarasikan di otoritas [kepabeanan](#) saat tiba di Korea Selatan, dibanding 262.556 ton pada tahun 2009 (lihat Gambar 5). Pada pertengahan tahun 2020, 61 persen dari angka tahun 2019 sudah masuk. Sepertinya tren meningkat ini akan terus berlanjut. Untuk tahun fiskal 2019/2020, impor minyak sawit diperkirakan sebesar [700.000 ton](#).

Gambar 5: Impor minyak sawit di Korea Selatan – 2009-2019



Sumber: Korea Trade Statistics Promotion Institute (KTSPI), berdasarkan analisis terhadap tujuh kode HS yang menyangkut minyak sawit dan produk turunannya. Data bea cukai KTSPI baru mencakup impor asam lemak sawit (PFAD) setelah bulan Mei 2020, dan oleh karena itu residu proses pengolahan minyak sawit tersebut belum termasuk dalam gambar ini.

Peningkatan impor dan konsumsi minyak sawit umumnya karena penggunaannya dalam proses pengolahan makanan dan produksi biosolar. Karena sifat minyak kelapa sawit yang “lebih fungsional dan lebih murah dari minyak kedelai”, maka Korea Selatan lebih banyak menggunakannya dalam [pengolahan makanan](#), terutama dalam produksi *ramen* (mie instan). [Saat ini](#), *ramen* mendominasi nilai ekspor pangan hasil pertanian dari Korea Selatan dengan tujuan Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Enam puluh lima persen (450.000 ton) dari total konsumsi minyak sawit dalam negeri di Korea Selatan digunakan untuk konsumsi industri dalam negeri (terutama biosolar), sedangkan sisanya (240.000 ton) digunakan untuk konsumsi pangan dalam negeri.

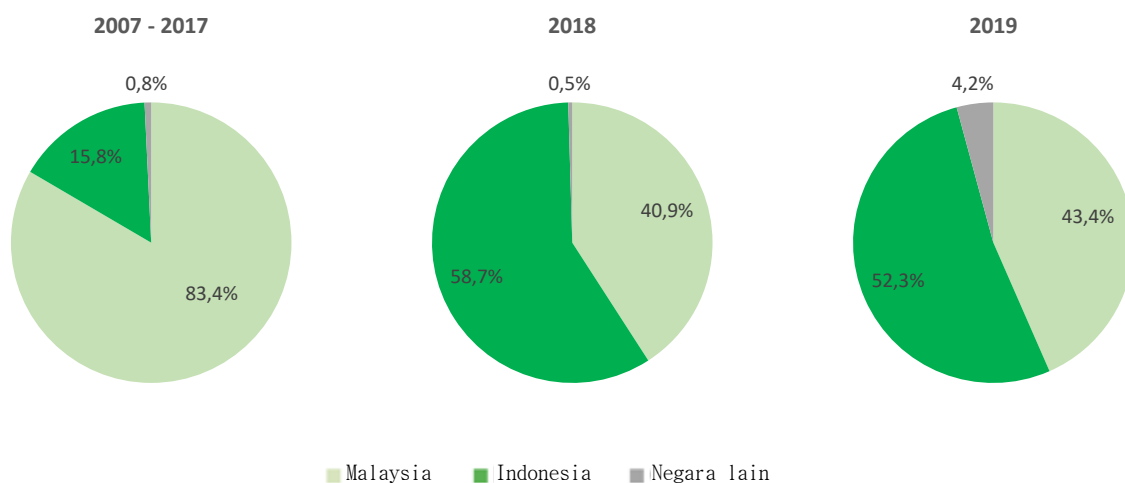
Berdasarkan [data](#) pengiriman tahun 2019 dan 2020 (sampai Triwulan III), Korea Selatan mengimpor **395.000 ton asam lemak sawit (PFAD) dari Indonesia dan Malaysia, di mana 130.288 ton berasal dari Indonesia**. Sementara, data [kepabeanan](#) Korea Selatan baru mulai memasukkan PFAD dalam data impornya pada bulan Mei 2020. PFAD adalah produk sampingan dari proses penyulingan minyak sawit mentah yang umumnya digunakan dalam produksi biosolar, pakan ternak, lilin dan sabun. PFAD lebih murah daripada minyak sawit dan tidak membeku pada suhu rendah, sehingga menjadi produk yang fleksibel pada kondisi musim dingin. Salah satu penerima besar untuk PFAD adalah produsen biosolar asal Korea Selatan, yaitu SK Eco Prime (sebelumnya bernama SK Chemicals), yang mengimpor [79 persen](#) ekspor PFAD dari Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 (sampai bulan Agustus 2020).

Mandat Korea Selatan mengenai kandungan minyak nabati dalam biosolar terpenuhi oleh minyak sawit yang lebih murah. Akhir-akhir ini, konsumsi minyak kedelai di sektor biosolar di Korea Selatan menurun sampai [nol](#) karena harga minyak kelapa sawit yang lebih murah. Namun demikian, impor minyak sawit pada tahun fiskal 2020/2021 [diperkirakan](#) akan tetap sama dengan tahun 2019/2020 (700.000 ton), akibat

"ketidakpastian terkait peningkatan persentase kandungan minyak nabati dalam biosolar dari persentase saat ini." Sejak tahun 2018, aturan biosolar tidak berubah dari 3 persen.

Peran Indonesia meningkat sebagai penyedia minyak sawit untuk Korea Selatan. Sebelum tahun 2016, Korea Selatan lebih banyak mengimpor minyak sawit dari Malaysia, namun selama empat tahun terakhir terjadi pergeseran menuju minyak sawit dari Indonesia (lihat Gambar 6). Pada tahun 2019, [52,3 persen](#) impor minyak sawit berasal dari Indonesia (339.462 ton), 43,4 persen dari Malaysia (281.687 ton) dan sisanya sebesar 4,2 persen dari negara lain. Perlu dicatat bahwa 22.120 ton impor CPO pada tahun 2019 berasal dari Papua Nugini (PNG). Sebelumnya negara tersebut tidak pernah memasokkan minyak sawit kepada Korea Selatan. Intel di lapangan menunjukkan bahwa sebagian CPO tersebut barangkali berasal dari pelabuhan di Vanimo, yang tidak jauh dari perkebunan dan pabrik Bewani Oil Palm Plantation ([BOPPL](#)) di Sapik Barat, Papua Nugini. CPO tersebut tiba di Pelabuhan Ulsan di Korea Selatan. Pabrik BOPPL tidak mematuhi kebijakan NDPE dan oleh karena itu, sepertinya memasok pasar "leakage" minyak sawit.

Gambar 6: Meningkatnya peran Indonesia sebagai penyedia minyak sawit untuk Korea Selatan



Sumber: Korea Trade Statistics Promotion Institute ([KTSPi](#)), berdasarkan analisis terhadap tujuh kode HS yang menyangkut minyak sawit dan produk turunannya (belum termasuk PFAD).

Peningkatan ekspor Indonesia ke Korea Selatan terutama terdiri dari *refined, bleached, dan deodorized (RBD) palm stearin*. Meskipun Korea Selatan mempunyai kilang [penyulingan](#), negara tersebut umumnya membeli produk minyak sawit olahan dari Indonesia. [Data kepabeanaan](#) Korea Selatan memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, negara tersebut mengimpor 220.556 ton *RBD palm stearin*, yaitu fraksi padat yang umumnya digunakan untuk [pengolahan makanan](#) dan kosmetik, dari Indonesia, dibanding 81.213 ton dari Malaysia. Selain itu, impor minyak inti kelapa sawit dan minyak sawit terhidrogenasi sebagian atau terhidrogenasi penuh dari Malaysia menurun masing-masing dari 5.838 ton menjadi 593 ton dan 1.187 ton menjadi 825 ton dari tahun 2018 ke 2019.

Lima pembeli non-NDPE menerima 78 persen ekspor minyak sawit Indonesia ke Korea Selatan

Lima pembeli Korea Selatan di peringkat atas pembelian minyak sawit Indonesia – JC Chemical, Dansuk Industrial, GS Global, AK Holdings dan LG Corporation – menerima 78 persen impor minyak sawit dari Indonesia pada tahun 2019. Kelima pembeli tersebut hanya mengimpor minyak sawit olahan dan produk

minyak sawit olahan (*stearin* dan alkohol lemak). Data ekspor minyak sawit Indonesia memperlihatkan total volume minyak sawit yang diekspor dari Indonesia sebesar 272.970 ton pada tahun 2019 yang dibeli oleh 32 perusahaan Korea Selatan. Lima diantaranya mengimpor 78 persen (212.415 ton) dari volume tahun 2019 tersebut (lihat Gambar 7). Hal yang sama berlaku pada semester pertama tahun 2020, di mana kelima perusahaan Korea Selatan tersebut tetap merupakan pengimpor utama untuk minyak kelapa sawit Indonesia. Data statistik perdagangan mengenai minyak sawit yang berasal dari Malaysia, yang dijabarkan berdasarkan pengimpor dan pengeksport, tidak tersedia untuk umum.

SK Eco Prime adalah produsen biosolar terkemuka dan pengimpor PFAD utama di Korea Selatan. Perusahaan ini, yang sebelumnya merupakan bagian dari SK Chemicals dan [diakuisisi](#) oleh investor ekuitas swasta Hahn & Co. pada awal tahun 2020, mempunyai [kapasitas](#) produksi biosolar dan minyak bahan bakar nabati sebesar 500.000 kiloliter per tahun. Sebagian besar bahan bakar tersebut digunakan untuk campuran pada sektor transportasi dan pembangkit listrik dalam negeri. Namun, perusahaan tersebut juga menjajaki penggunaan biosolar untuk bahan bakar kapal, yang dapat menambah kontribusi sebesar 250.000 kiloliter. Bahan baku utama yang digunakan oleh SK Eco Prime adalah PFAD, dan perusahaan ini merupakan pengimpor utama di Korea Selatan. Sekitar sesemester [impor](#) PFAD Korea Selatan berasal dari Indonesia, dan SK Eco Prime menampung 79 persen dari impor tersebut.

Sejauh ini tidak satupun dari pembeli Korea Selatan tersebut yang mengumumkan komitmen NDPE, atau menyelidiki praktik kerja para pemasoknya. Sebagai akibatnya, pembeli tersebut menanggung risiko yang lebih besar ketika membeli minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Tidak terdapat bukti apapun yang tercantum di situs laman perusahaan pembeli utama ini mengenai uji tuntas sistemis terhadap para pemasok minyak sawitnya untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap lingkungan, sosial, hak asasi manusia maupun nilai budaya. Selain itu, perusahaan tersebut tidak transparan dalam mengumumkan daftar pabrik pemasok, pembuatan kanal pengaduan, maupun bukti pembelian minyak sawit tersegregasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikasi akan upaya menuju pembelian yang berkelanjutan, seperti [sertifikasi](#) RSPO yang diberikan kepada Samsung C&T pada tahun 2019 untuk perkebunan kelapa sawitnya. Selain itu, meskipun LG Corporation tidak mempunyai maupun menyinggung kebijakan NDPE, pemilik lama anak perusahaannya, yaitu PT Barito Pacific Tbk, mempunyai "kebijakan perkebunan dan kehutanan yang bertanggungjawab" tertanggal [Maret 2015](#). LG Corporation mengakuisisi beberapa perusahaan dari Barito Pacific pada tahun [2018](#). Masih belum jelas sejauh mana LG Corporation menerapkan kebijakan kehutanan yang bertanggungjawab setelah terjadinya merger.

Gambar 7: Lima pembeli Korea Selatan di peringkat atas pembelian minyak sawit Indonesia pada tahun 2019, termasuk grup pengeksport

Pembeli Korea – Grup pengeksport	Impor minyak sawit (tons)	Pembeli Korea – Grup pengeksport	Impor minyak sawit (ton)
JC Chemical	59.392	AK Holdings	30.166
Incasi Raya	22.899	Tunas Baru Lampung	13.250
Astra Agro Lestari	25.539	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (pada tahun 2020)	-
Musim Mas	5.954	Royal Golden Eagle	6.000
Wilmar International (pada tahun 2020)	-	Musim Mas	2.031
Kuala Lumpur Kepong (KLK)	5.000	Salim Group (pada tahun 2020)	-
Dansuk Industrial	56.559	Astra Agro Lestari	3.000
Musim Mas	39.043	Wilmar International	2.994
KLK	6.999	KPN Corp	2.000
Royal Golden Eagle	5.000	Cahya Nusantara Lestari	500

Astra Agro Lestari	3.500	Sinarmas Cepca	391
Incasi Raya (pada tahun 2020)	-	LG Corporation	19.802
Sinarmas Cepca	1.900	Astra Agro Lestari	12.999
Bakrie Sumatera Plantation	117	Musim Mas	3.194
GS Global	46.496	Wilmar International	2.109
Astra Agro Lestari	21.000	KLK	1.499
Incasi Raya	7.499	Pembeli lain (27)	60.555
Musim Mas	12.999	Total keseluruhan	272.970
Wilmar International (pada tahun 2020)	-		
KLK	4.998		

Sumber: [Data statistik perdagangan](#) Indonesia. PFAD dan peran pembeli utama SK Eco Prime belum termasuk karena didasarkan [data pengiriman](#) yang berbeda.

JC Chemical dan Dansuk Industrial bergerak secara khusus di industri energi terbarukan, dengan biosolar, bio-heavy oil dan bahan bakar nabati untuk kapal sebagai produk utama. JC Chemical juga memproduksi minyak sawit dan gliserin, sementara [Dansuk Industrial](#) memproduksi bahan halus (msl. stabilizer PVC) dan logam (timah hitam murni). Selain sebagai pembeli minyak kelapa sawit, JC Chemical juga memproduksi minyak sawit melalui perkebunan dan pabrik kelapa sawitnya di Indonesia. [Menurut laporan](#), JC Chemical memasok produknya di lembaga pertahanan dan perusahaan minyak dalam negeri.

Segmen terbesar yang dioperasikan oleh GS, yang terdiri dari GS Holdings dan berbagai anak perusahaan dan perusahaan yang terafiliasi, adalah sektor energi (gas dan tenaga angin), di samping ritel dan konstruksi. Perusahaan tersebut, yang [diklaim](#) sebagai grup perusahaan terbesar ketujuh di Korea Selatan dari segi asetnya, mempunyai anak perusahaan dan perusahaan afiliasi termasuk GS Global, GS Energy, GS Caltex, GS Retail, GS SHOP, GS EPS, GS Sports, GS E&R dan GS E&C. GS Global merupakan bagian utama grup yang memulai dan mengembangkan usaha di luar negeri.

Portofolio usaha AK Holdings atau Aekyun Group mencakup kimia, penerbangan, rumah tangga/kecantikan, ritel dan properti. Pada tahun 1982, [Aekyung Group](#) dan Royal Dutch Shell mendirikan Aekyung Shell Co., yang menjadi Aekyung Specialty Chemicals pada tahun 1998. AK ChemTech, yang terdaftar pada tahun 2009 dan bergerak di bidang manufaktur surfaktan, cat dan bahan kimia konstruksi, menjadi [anggota RSPO](#) sejak tanggal 1 November 2019. Sampai pertengahan tahun 2020, perusahaan tersebut belum mengumumkan informasi apapun mengenai pemasok minyak sawitnya.

Selain menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, LG Corporation juga merupakan salah satu dari kelima pembeli minyak sawit terbesar dari Korea Selatan. [Segmen usaha](#) perusahaan tersebut mencakup elektronik, kimia, komunikasi dan jasa komunikasi.

Pembeli asal Korea Selatan membeli 33 persen minyak sawit Indonesia dari perusahaan “leakage”

Karena Korea Selatan umumnya mengimpor produk minyak sawit olahan dari Indonesia dan Malaysia, maka sebagian besar impor sudah memenuhi kebijakan NDPE di perusahaan dagang dan pengolahan. Pada tahun 2019 dan semester pertama 2020, Korea Selatan mengimpor 414.119 ton minyak sawit Indonesia dari 18 perusahaan dagang/penyulingan. Dari perusahaan dagang/penyulingan tersebut, 78 persen mempunyai kebijakan NDPE (lihat Gambar 8). Dari segi volume ekspor ke Korea Selatan, lima grup perusahaan di peringkat paling atas pada tahun 2019 dan semester pertama 2020 adalah Musim Mas (103.442 ton), Astra Agro Lestari (73.038 ton), Incasi Raya (62.103 ton), Permata Hijau Group (35.446 ton) dan Salim Group (31.790 ton). Semua grup tersebut, kecuali Incasi Raya Group, mempunyai kebijakan

NDPE. Salim Group mempunyai [komitmen NDPE](#), namun karena penerapannya yang masih kurang, maka dapat dianggap sebagai [perusahaan pengolahan “leakage”](#).

Gambar 8: Semua grup perusahaan yang mengekspor minyak sawit Indonesia ke Korea Selatan

Grup Pengekspor	Minyak Sawit (ton)			Kebijakan NDPE?
	2019	2020	Total	
Musim Mas	69.433	34.009	103.442	Ada
Astra Agro Lestari	69.038	4.000	73.038	Ada
Incasi Raya Group	30.399	31.704	62.103	Perusahaan pengolahan “leakage” (tidak ada kebijakan NDPE)
Permata Hijau Group	11.000	24.446	35.446	Ada
Salim Group	17.025	14.765	31.790	Perusahaan pengolahan “leakage” (ada kebijakan NDPE namun penerapan masih kurang)
Wilmar International	5.255	15.741	20.996	Ada
Tunas Baru Lampung	17.000	3.000	20.000	Perusahaan pengolahan “leakage” (tidak ada kebijakan NDPE)
Kuala Lumpur Kepong (KLK)	18.496		18.496	Ada
Wings Group	12.500		12.500	Perusahaan pengolahan “leakage” (ada kebijakan NDPE namun penerapan masih kurang)
Royal Golden Eagle	11.000		11.000	Ada
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)		7.419	7.419	Perusahaan pengolahan “leakage” (tidak ada kebijakan NDPE)
Golden Agri-Resources		5.066	5.066	Ada
KLK-Astra	4.000		4.000	Ada
Sinarmas Cepsa	3.100		3.100	Ada
KPN Corp	2.000		2.000	Ada
Pengekspor/pengolah lain	899	998	1.897	Perusahaan pengolahan “leakage” (tidak ada kebijakan NDPE)
Ecogreen Oleochemicals	1.632		1.632	Ada
Bakrie Sumatera Plantation	193		193	Ada
Total	272.970	141.149	414.119	

Sumber: [Data statistik perdagangan](#) Indonesia, situs web perusahaan, [Kajian CRR](#) tentang perusahaan pengolahan “leakage”. Belum termasuk ekspor PFAD, data tahun 2020 semester pertama saja.

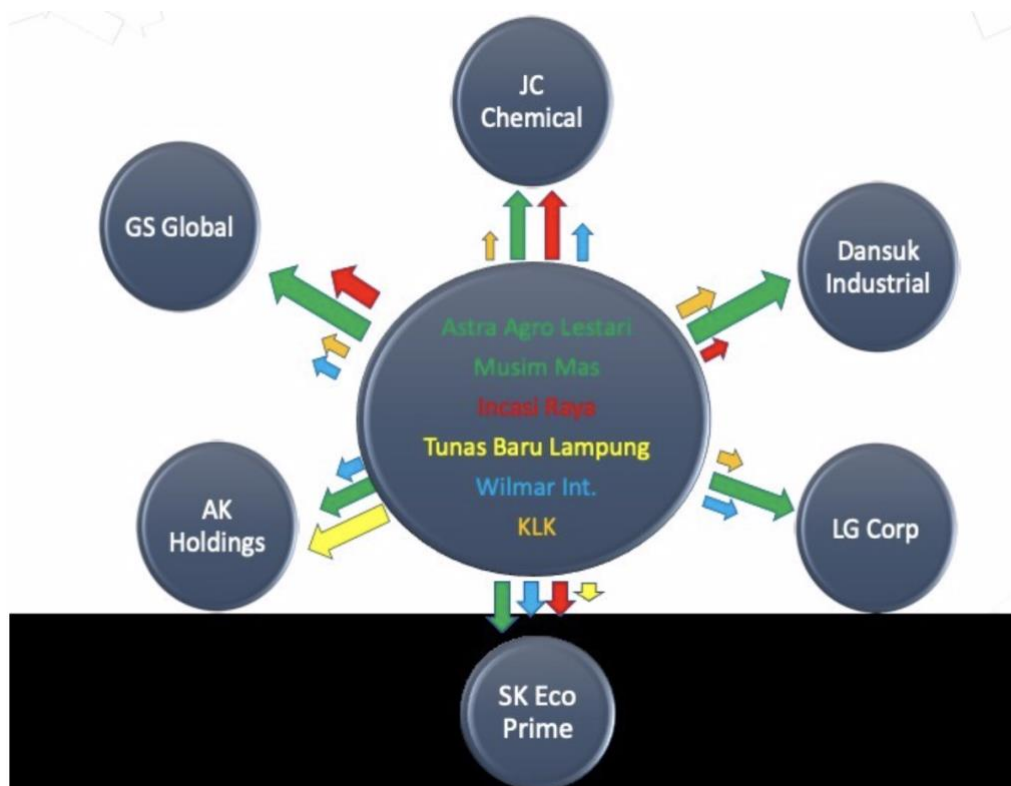
Tiga puluh tiga persen dari seluruh impor minyak sawit Indonesia di Korea Selatan, atau **135.709 ton**, pada tahun 2019 dan semester pertama 2020 berasal dari perusahaan perkebunan dan pengolahan “leakage”, terutama Incasi Raya Group dan Tunas Baru Lampung yang belum mempunyai komitmen NDPE, serta Salim Group dan Wings Group yang tidak menerapkan komitmennya (lihat Gambar 8). Salim Group, Tunas Baru Lampung dan Wings Group termasuk dalam [peringkat lima perusahaan pengolahan “leakage” terbesar](#) dari Indonesia dan Malaysia.

AK Holdings, JC Chemical dan SK Eco Prime membeli banyak minyak sawit dan PFAD non-NDPE

AK Holdings, JC Chemical dan SK Eco Prime adalah perusahaan-perusahaan yang paling banyak mengandalkan minyak sawit dan PFAD “leakage” dari Indonesia, dengan persentase pembelian non-NDPE masing-masing sebesar 64 persen, 40 persen dan 33 persen dari pemasok. Lima perusahaan Korea di peringkat paling atas untuk pembelian minyak sawit Indonesia (belum termasuk PFAD) membeli 28 persen (83.315 ton dari total sebesar 297.500 ton) dari perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit yang tidak memenuhi syarat keberlanjutan. SK Eco Prime membeli 103.488 ton PFAD dari Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 (sampai bulan Agustus), di mana 33 persen dibeli dari pemasok PFAD non-NDPE.

JC Chemical, Dansuk Industrial, SK Eco Prime dan GS Global membeli minyak sawit dari perusahaan perkebunan non-NDPE Incasi Raya Group, yang membuka 792 ha hutan dan lahan gambut dari tahun 2016 sampai 2019. JC Chemical mengandalkan grup tersebut untuk kelapa sawit dan karet di Indonesia. Dengan menggabungkan pembelian minyak sawit dan produk turunan dari Indonesia untuk tahun 2019 dan semester pertama tahun 2020, maka JC Chemical memperoleh 40 persen dari Incasi Raya Group (22.899 ton pada tahun 2019 dan 9.990 ton pada semester pertama 2020). Sebaliknya, JC Chemical memperoleh 31 persen pasokannya dari perusahaan pengolahan NDPE Astra Agro Lestari dan 12 persen dari Musim Mas. GS Global membeli 27 persen impor minyak sawitnya dari Incasi Raya pada tahun 2019 dan semester pertama 2020, SK Eco Prime memperoleh 14 persen PFAD dari Incasi Raya pada tahun 2019 dan 2020 (sampai bulan Agustus), sedangkan Dansuk Industrial menampung 4 persen pada semester pertama tahun 2020.

Gambar 9: Grup pengeksport utama Indonesia dan pembeli minyak sawit utama di Korea Selatan



Sumber: Aidenvironment, berdasarkan [data statistik ekspor](#) Indonesia tahun 2019 dan semester pertama 2020, dan [data](#) pengiriman tahun 2019 dan kuartal satu sampai tiga tahun 2020

Incasi Raya Group memiliki 31 anak perusahaan kelapa sawit di berbagai wilayah di pulau Sumatera dan Kalimantan dengan total luas bank tanah yang diperkirakan sebesar 322.615 ha. Analisis [Aidenvironment/Earth Equalizer](#) memperlihatkan bahwa dua anak perusahaannya, yakni PT Sumatera Jaya Agro Lestari 1 (SJAL 1) dan PT SJAL 2 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, melakukan deforestasi seluas 582 ha dan membuka 210 ha lahan gambut dari tahun 2016 sampai 2019. Selain itu, anak perusahaan PT Sumatera Makmur Lestari diprotes oleh petani plasma terkait pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dan pembagian penerimaan dari hasil panen.

Enam puluh empat persen pembelian minyak sawit dari Indonesia oleh AK Holdings dapat dianggap sebagai minyak sawit “leakage”. Dari total pembelian minyak sawit Indonesia sebesar 48.595 ton oleh perusahaan tersebut selama tahun 2019 dan semester pertama tahun 2020, 64 persen (31.169 ton) di antaranya berasal dari perusahaan non-NDPE Tunas Baru Lampung (16.250 ton), PTPN (7.419 ton), Cahya Nusantara Lestari (500 ton), perusahaan pengolahan NDPE yang "tidak menerapkan kebijakannya" Salim Group (5.000 ton), dan KPN Corporation – sebelumnya bernama Gama (2.000 ton). Setelah dibekukan dari pasar NDPE pada tahun 2018, Gama secara resmi menetapkan dirinya sebagai grup korporat dan mengganti namanya menjadi KPN Corporation. Gama dibekukan oleh Wilmar International, Musim Mas dan perusahaan lain karena [membuka](#) hutan dan lahan gambut seluas 21.500 ha sejak tahun 2013 di lima areal konsesinya di Papua dan Kalimantan Barat.

SK Eco Prime membeli 33 persen impor PFAD Korea Selatan yang berasal dari Indonesia dari perusahaan pengolahan “leakage”. Pemasok Indonesia yang memasokkan PFAD kepada SK Eco Prime pada tahun 2019 dan semester pertama tahun 2020 adalah Astra Agro Lestari (30 persen), Wilmar (16 persen) dan Royal Golden Eagle (14 persen), serta perusahaan non-NDPE seperti Incasi Raya (14 persen), Best Industry Group (13 persen), Salim Group (4 persen) dan Tunas Baru Lampung (2 persen). Best Group adalah salah satu perusahaan pengolahan besar yang menjadi bagian dari perusahaan “leakage” di Indonesia. Laporan [CRR](#) memperlihatkan bahwa Best Group membuka hampir 2.300 ha lahan gambut di areal perkebunannya pada tahun 2019 untuk penanaman kelapa sawit. Perusahaan tersebut juga terlibat dalam konflik atas dugaan penanaman secara ilegal di lahan seluas 1.800 ha.

Di antara pembeli besar asal Korea, hanya LG Corporation yang membeli keseluruhan produk minyak sawit Indonesianya dari perusahaan yang menerapkan kebijakan NDPE (lihat Gambar 9). Namun demikian, bocoran minyak sawit yang tidak berkelanjutan mungkin tetap terjadi akibat tidak adanya komitmen NDPE di tingkat grup antara para pembeli, tidak adanya penyelidikan terhadap praktik pemasok, dan rantai pasokan yang tidak transparan.

Di sektor hilir, minyak sawit digunakan dalam produksi mie instan dan cemilan

Sektor hilir di Korea Selatan umumnya menggunakan minyak sawit untuk pengolahan makanan, produksi minyak goreng, dan biosolar. Dalam pengolahan makanan, mie *ramen* instan menjadi salah satu tujuan utama untuk 240.000 ton minyak sawit yang digunakan di industri produksi [bahan makanan](#). Pada tahun 2020, perusahaan Korea Selatan diperkirakan akan memproduksi lebih dari 460.000 ton [mie ramen](#). Dengan komposisi [berat](#) rata-rata sebesar 20 persen, maka penggunaan minyak sawit untuk produksi *ramen* diperkirakan mencapai 100.000 ton. Korea Selatan adalah konsumen mie *ramen* yang terbesar di dunia. Pada saat yang sama, nilai ekspor *ramen* instan mencapai \$AS 467 juta pada tahun 2019, dan menjadi lebih dari dua kali lipat selama periode lima tahun, dengan Amerika Serikat sebagai tujuan [pasar](#)

luar negeri yang paling besar. Selama delapan bulan pertama tahun 2020, [permintaan](#) internasional melonjak sebesar 37 persen y-o-y karena pandemi COVID-19 mendorong peningkatan pembelian makanan yang tidak mudah rusak. Semua produsen *ramen* utama di Korea Selatan, yang terdaftar di Gambar 10, mempunyai [kapasitas](#) penyulingan.

Sejauh ini tidak satupun produsen mie *ramen* tersebut yang mempunyai kebijakan NDPE, dan identitas pemasoknya masih belum jelas.

Gambar 10: Produsen mie ramen utama di Korea Selatan

Perusahaan	Produk	Volume pembelian minyak sawit (ton) 2019	Pengadaan minyak sawit
Nong Shim Co.	Perusahaan <i>ramen</i> dan cemilan terbesar, produknya tersedia di >100 negara	40.000	Minyak sawit dibeli di pasar spot dari Malaysia; anggota RSPO, diharapkan untuk membeli minyak sawit bersertifikat dari tahun 2023 .
Ottogi Foods Co.	Makanan kering, bumbu, lemak, minyak, produk katun	Tidak diketahui	Anggota RSPO, diharapkan untuk membeli minyak sawit bersertifikat dari tahun 2020 .
CJ Cheiljedang Corp.	Selain <i>ramen</i> , juga memproduksi lemak, gula, produk makanan lain, biosolar, pakan ternak	3.600	2018 minyak sawit diperoleh dari Malaysia (56%), Indonesia (19%), Amerika Selatan (25%); anggota RSPO, 28% minyak sawit bersertifikat pada 2019 (untuk pangan saja); diharapkan sebesar 100% pada 2024.

Sumber: Laporan penelitian pasar [2019](#); Situs web dan laporan tahunan perusahaan; laporan tahunan RSPO

Minyak sawit sering digunakan di Korea Selatan untuk bahan makanan seperti cemilan, mentega putih, margarin dan krimer kopi. Penggunaan dalam produksi minyak goreng sepertinya kecil, karena minyak sawit *olein* dalam minyak campur terbatas pada 10-30 persen untuk minyak goreng. Penggunaan langsung sebagai *edible oil* untuk konsumsi rumah tangga juga minimal.

Lembaga keuangan dan bank Korea Selatan serta investor Eropa tetap mendanai minyak sawit yang tidak berkelanjutan

Kepemilikan terbesar di rantai pasokan minyak sawit “leakage” Korea Selatan dipegang oleh National Pension Service, Samsung Life Insurance, BlackRock, Vanguard dan Norges Bank. Investor tersebut mencakup bagian hilir, tengah dan hulu di rantai “leakage”. Sebagian besar perusahaan Korea Selatan yang terlibat di pasar “leakage” minyak sawit merupakan bagian dari grup perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, penyesuaian digunakan pada Gambar 12 untuk menyikapi hal tersebut. Total nilai pembiayaan yang belum disesuaikan mencapai lebih dari \$AS 5 miliar. Posisi Norges Bank/Norwegian Sovereign Wealth Fund patut diperhatikan karena semakin aktif menghindari deforestasi dalam investasinya. Korindo, yang kurang transparan dalam hal produksi dan pembiayaan, tidak ditampilkan pada Gambar 11, namun dibahas di bagian berikut ini.

Gambar 11: Kepemilikan saham dalam rantai minyak sawit Korea Selatan yang tidak berkelanjutan (belum disesuaikan)

	\$AS juta
National Pension Service	3.510
Vanguard	629

BlackRock	625
Samsung Life Insurance	300
Norges Bank/Norwegian Sovereign Wealth Fund	200
Total	5.264

Sumber: Chain Reaction Research, Bloomberg, diakses pada tanggal 27 November 2020; Nong Shim Co., Ottogi Foods Co., CJ Cheiljedang Corp. AK Holdings, JC Chemical, Posco International, LG Corporation, Samsung C&T, Daesang Corporation. Belum disesuaikan untuk % omset minyak sawit versus total kegiatan.

Lembaga keuangan Korea Selatan dan Eropa tetap mendanai perusahaan perkebunan “leakage” di luar negeri walaupun terjadi deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun [Norwegian Sovereign Wealth Fund](#) dan [ABP](#) melakukan divestasi dari Posco akibat kerusakan lingkungan berat, beberapa lembaga keuangan Korea Selatan tetap mendanai perusahaan tersebut. Laporan [Forests & Finance](#) memperlihatkan bahwa lembaga keuangan Korea Selatan menyediakan 43 persen dari total pendanaan senilai \$AS 390 juta untuk Posco, Samsung dan LG dari tahun 2013 sampai April 2020. Jumlah tersebut sudah disesuaikan untuk porsi minyak sawit di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, pada semester pertama tahun 2018, Pemerintah Korea Selatan menyediakan pinjaman publik sebesar KRW [30,5 miliar](#) (\$AS 27 juta) kepada Posco, dan 11.5 miliar KRW (\$AS 10 juta) kepada JC Chemical. Selain itu, [berdasarkan laporan](#), Export-Import Bank of Korea (KEXIM) menyediakan pinjaman untuk kegiatan operasional PT BIA, yaitu anak perusahaan Posco. Akhirnya, 21 persen pendanaan yang teridentifikasi di tiga perkebunan luar negeri Korea Selatan diberikan oleh Lembaga keuangan Eropa. Lembaga keuangan Eropa menghadapi semakin banyak [risiko reputasi](#) karena menyediakan jasa keuangan kepada pelaku rantai pasokan yang dikaitkan dengan deforestasi.

Gambar 12: Pendanaan yang teridentifikasi dan disesuaikan untuk tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit Korea Selatan (\$AS juta)

Pemodal	Obligasi	Pinjaman korporat	Saham	Penerbitan saham	Penerbitan obligasi	Total
Total	7,5	1,7	143,8	48,5	188,2	389,7
Penyedia modal Korea Selatan % dari total			54,4 38%	10,2 21%	102,7 55%	167,3 43%
6 lembaga di peringkat atas:						
NongHyup Financial			0,7	3,4	45,4	49,5
National Pension Service			39,2			39,2
Mirae Asset Financial Group			2,7		19,8	22,5
Korea Investment Holdings			1,1		18,3	19,4
KB Financial Group			1,3	0,2	5,5	6,9
Samsung Life Insurance			5,6			5,6
Penyedia modal Eropa % dari total	0,4 5%	0,9 50%	15,5 11%	6,5 13%	59,2 31%	82,4 21%

Sumber: Chain Reaction Research, Forests & Finance, diakses pada tanggal 27 November 2020; penyesuaian telah diterapkan (d disesuaikan untuk kegiatan terkait); Posco, LG International, Samsung C&T

Lembaga publik Korea Selatan tidak berperan aktif dalam penegakan kebijakan hak asasi manusia dan/atau uji tuntas terhadap perusahaan yang didanai. Dua LSM Korea Selatan, yakni KFEM dan APIL, yang mengkaji mekanisme pemerintah terkait pembiayaan dan uji tuntas luar negeri, tidak menemukan [bukti](#) adanya proses peninjauan peminjaman yang sistematis. Sejauh ini Pemerintah Korea Selatan belum

mempunyai mekanisme uji tuntas untuk hak asasi manusia, maupun menetapkan "tindakan yang tepat untuk mencegah atau meminimalkan kerugian [ekonomi, sosial dan budaya]". Total pinjaman publik dari Korea Forest Service (KFS) kepada Posco International, Daesang Corporation, LG Corporation, Korea Development Corporation dan JC Chemical mencapai KRW 29 miliar (\$AS 26 juta) dari tahun 2011 sampai 2019, meskipun terbukti adanya masalah lingkungan dan hak asasi manusia di perkebunannya. Pinjaman senilai KRW 4,9 miliar (\$AS 4,4 juta) diberikan kepada Posco pada bulan April 2019.

Selain National Pension Service (lihat bagian berikut ini), investor Korea Selatan antara lain adalah NongHyup Financial, Mirae Asset Financial Group, Korea Investment Holdings, KB Financial Group dan Samsung Life Insurance. Investor tersebut belum mempunyai kebijakan mengenai deforestasi.

Lembaga penyedia modal Eropa turut aktif dalam penerbitan obligasi pada perusahaan Korea Selatan yang terkait dengan minyak sawit "*leakage*". Yang paling aktif adalah [Standard Chartered](#), [BNP Paribas](#), [HSBC](#) dan Credit Agricole. Semua bank tersebut, kecuali Credit Agricole, mempunyai kebijakan nol deforestasi.

National Pension Service Korea: Investor terbesar di perusahaan non-NDPE, Posco International, Samsung C&T, LG International dan SK Eco Prime

Per bulan April 2020, investasi dari bank dan investor di Posco International (anak perusahaan Posco), setelah disesuaikan untuk minyak sawit, mencapai \$AS 137 juta. National Pension Service (NPS) Korea Selatan merupakan pemegang saham terbesar kedua di Posco dengan kepemilikan sebesar 11,7 persen, setelah kepemilikan BlackRock yang sebesar 12,3 persen. NPS juga memiliki 5,4 persen saham di Posco International, yaitu anak perusahaan dengan kepemilikan 63 persen oleh Posco, termasuk kegiatan perkelapasawitannya. Dalam 63 persen kepemilikan saham Posco atas Posco International, termasuk untuk sektor kelapa sawit, NPS memiliki 5,4 persen saham. NPS merupakan investor terbesar di Korea Selatan dan dana pensiun terbesar ketiga di dunia dengan nilai aset sebesar KRW 777 triliun (\$AS 689 miliar) pada bulan Oktober 2020. NPS mengumumkan rencana pada bulan Mei 2020 untuk meningkatkan kepemilikan investasi luar negerinya sebelum tahun 2025. Meskipun NPS menyatakan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip investasinya, sepertinya portofolio pengembangannya bertentangan dengan prinsip tersebut. Sebagai contoh, NPS berada di peringkat lima sebagai investor global di pembangunan produksi batubara, dengan kepemilikan saham senilai \$AS 4,2 miliar di tiga perusahaan pengembang batubara. Baru-baru ini, NPS menunjukkan minat untuk memasukkan kriteria ESG ke dalam investasi ekuitas dan obligasi dalam negerinya, namun tidak menyinggung portofolio luar negerinya.

Di samping Posco, NPS juga merupakan pemegang saham utama di perusahaan Korea Selatan, Samsung C&T, LG International dan SK Eco Prime. Per bulan April 2020, nilai investasinya di masing-masing perusahaan tersebut adalah \$AS 5,4 juta (\$AS 1,3 miliar sebelum disesuaikan), \$AS 2,2 juta (\$AS 37 juta sebelum disesuaikan) dan \$AS 110 juta (belum disesuaikan).

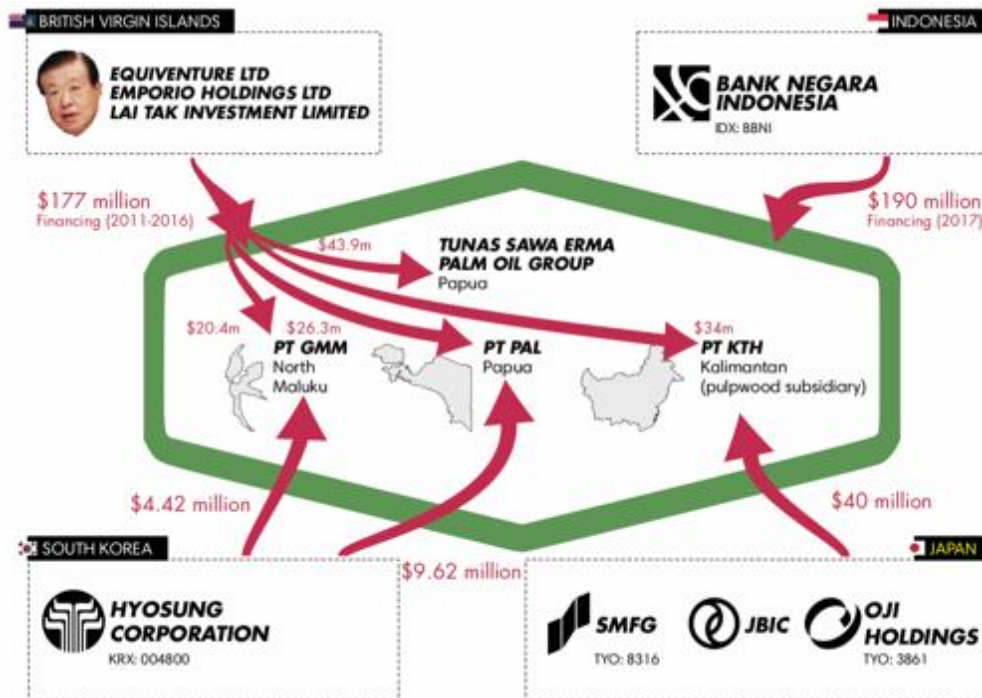
BlackRock merupakan pemegang saham terbesar kedua di Posco International dengan nilai investasi sebesar \$AS 15,9 juta. Kajian tentang [BlackRock](#), yang terbit pada bulan Agustus 2019, memperlihatkan peran besar dari pengelola dana terbesar di dunia tersebut dalam pembiayaan aktivitas yang terkait deforestasi dan konflik lahan, dan bahwa "dananya yang berlabel ESG mengandung berbagai kepemilikan sekuritas berisiko tinggi terkait deforestasi dan konflik". Pihak lembaga Korea Selatan lain yang mendanai

Posco antara lain adalah Samsung Life Insurance (\$AS 4,5 juta) dan Mirae Asset Financial Group (\$AS 2,4 juta).

Pemegang saham utama di Korindo masih lamban soal kebijakan ESG (lingkungan, sosial dan penatakelolaan)

Investor langsung di Korindo berasal dari Indonesia, Jepang, British Virgin Islands dan Korea Selatan. [Kajian](#) tahun 2018 terhadap para pemodal Korindo memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut menerima tiga aliran investasi langsung: bank swasta dan pemerintah di Indonesia dan Jepang; mitra usaha patungan di Korea Selatan dan Jepang; dan perusahaan tempurung lepas pantai yang dikendalikan pemimpin Korindo, Eun-Ho Seung (lihat Gambar 13). Korindo Group menerima sebagian besar [kreditnya](#) melalui Bank Negara Indonesia (BNI), yang sepertinya belum mempunyai sistem uji tuntas yang efektif. Selain itu, Jepang juga berperan sebagai negara tujuan penting untuk serpihan kayu dan produk kayu Korindo. SMBC Group dari Jepang – yang juga dikenal dengan nama Sumitomo-Mitsui Financial Group, atau SMFG – mendanai anak perusahaan kayu pulp Korindo bernama PT Korintiga Hutani (PT KTH). SMBC juga mendanai dua mitra usaha Korindo asal Jepang, yaitu Oji Holdings dan Sumitomo Forestry. Pada saat memberikan pinjaman, SMBC tidak mempunyai kebijakan khusus mengenai hak asasi manusia maupun sektor kehutanan.

Gambar 13: Pinjaman dan investasi di usaha sektor kehutanan Korindo Group [\$AS] yang teridentifikasi selama tahun 2018



Sumber: Rainforest Action Network, TuK-INDONESIA, Walhi dan Profundo. [Perilous: Korindo, land grabbing & banks \(2018\)](#)

Hyosung Corporation, sebuah grup perusahaan Korea berbasis keluarga, dan satu-satunya perusahaan Korea dengan kepemilikan saham di anak perusahaan Korindo, PT PAL dan PT GMM, ditentang oleh [KFEM](#) pada bulan September 2016 atas pelanggaran ESG (lingkungan, sosial dan penatakelolaan) yang dilakukan

oleh perusahaan penerima investasinya. Hyosung mengatakan akan "mengecek fakta", namun pada bulan Mei 2019 grup perusahaan tersebut belum mengambil tindakan apapun. Akhirnya, kegiatan operasional Korindo didanai lebih dari [\\$AS 177 juta](#) oleh "kluster perusahaan tidak transparan di kepulauan British Virgin Islands" yang dimiliki pemimpin Korindo sejak tahun 2011.

Sanggahan: Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (misl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.